

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DUKUNGAN KEPALA DAERAH RIAU TERHADAP JOKOWI-MA'RUF AMIN DI MEDIA ONLINE BERTUAHPOS.COM PERIODE OKTOBER 2018

¹dinia mutiarahmi, ²Mustafa

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: diniamutiarahmi@gmail.com

ABSTRAK

Kasus dukungan kepala daerah Riau terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin dengan menggunakan nama bupati/walikota pada masa kampanye cukup menyita perhatian publik. Melihat permasalahan pemilu yang selalu muncul setiap masanya, hal ini tentu menjadi santapan menarik bagi media massa untuk memberitakannya. Salah satu media massa yang memberitakan kasus ini adalah Bertuahpos.com dengan 17 berita yang lebih cenderung kepada Bawaslu Riau untuk memeriksa kepala daerah yang melanggar aturan pemilu dalam beritanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bertuahpos.com membongkar kasus dukungan kepala daerah Riau terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin periode Oktober 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman yang memiliki empat perangkat yaitu, *Define problems* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (sumber masalah), *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral) dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian). Hasil penelitian ini pada pendefinisian masalah adalah Bertuahpos.com melihat masalah ini bukan hanya masalah hukum melainkan masalah etika dan politik. Pada sumber masalah, Bertuahpos.com menempatkan kepala daerah Riau sebagai penyebab masalah dalam kasus ini. Untuk keputusan moralnya adalah dukungan yang dilakukan kepala daerah adalah dukungan yang positif meskipun menggunakan nama jabatan. Pada elemen menekankan penyelesaian, Bertuahpos.com merekomendasikan agar masalah ini tidak ditindaklanjuti karena kepala daerah terbukti tidak melanggar aturan apapun.

Kata kunci: *Framing, Dukungan kepala daerah Riau, Media Online*

Pendahuluan

Dalam kerangka pembentukan opini publik, media massa umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol

¹⁰ Anwar Arifin, "*Komunikasi Politik*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 189.

¹¹ Goriau.com, "*Amsi Riau Sudah Terverifikasi Faktual*", Dalam <https://m.goriau.com/berita/baca/amsi-riau-sudah-terverifikasi-faktual.html>, (diakses 12 November 2019).

¹² Alexa.com, "*Bertuahpos.com Traffic Statistics*", Dalam <https://www.alexa.com/siteinfo/bertuahpos.com>, (diakses 31 Januari 2019).

politik (*language of politic*). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*). Tatkala melakukan tiga tindakan itu, boleh jadi sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku.¹³

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pengemasan pesan dalam penyelesaian masalah kasus kepala daerah Riau di media *online* bertuahpos.com dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Analisis *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan atau dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.¹⁴ Oleh karena itu dibutuhkan analisis *framing* untuk melihat bagaimana cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh media tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menegaskan bahwa *pertama*, dengan adanya survei yang dilakukan IPI, dalam empat tahun terakhir pencarian berita politik melalui internet meningkat lebih dari tiga kali lipat. *Kedua*, pemilu di Indonesia selalu punya permasalahan di setiap masanya. *Ketiga*, aktor politik dan media massa tidak dapat dipisahkan antara keduanya. *Keempat*, berdasarkan survei dari LIPI menyatakan bahwa ada beberapa problem yang berpotensi muncul pada pemilu serentak 2019. *Kelima*, media di Riau yang turut memberitakan secara intens kasus dukungan kepala daerah Riau terhadap Jokowi Ma'ruf Amin adalah Bertuahpos.com.

Kajian Teori

1. Analisis Framing

a. Definisi Framing

Analisis *framing* adalah salah satu pendekatan untuk melihat realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media.²⁰ Realitas dapat disajikan secara menonjol maupun tidak oleh suatu media. Realitas yang disajikan secara menonjol akan lebih mudah diingat oleh pembaca, sedangkan realitas yang tidak ditonjolkan oleh media akan kurang diingat atau bahkan tidak diketahui oleh pembaca. Dalam melakukan pbingkaian (*framing*) peristiwa politik. Minimal oleh sebab adanya tuntutan teknis: keterbatasan-keterbatasan kolom dan halaman (pada media cetak) atau waktu (pada media elektronik), jarang ada media yang membuat berita sebuah peristiwa secara utuh mulai dari menit pertama kejadian hingga ke menit akhir. Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar dan rumit, dicoba “disederhanakan” melalui mekanisme pbingkaian (*framing*) fakta- fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang.²¹

Jadi disini media hanya memilih hal yang menarik ataupun penting dari suatu peristiwa yang memiliki nilai berita sehingga kemudian hal itulah yang akan lebih diingat atau lebih melekat oleh pembaca. Sasaran dari analisis *framing*, sebagai salah satu metode analisis wacana, adalah menemukan “aturan dan norma” yang tersembunyi dibalik sebuah teks. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui perspektif atau pendekatan yang dipergunakan oleh sebuah media dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa. Analisis ini membantu kita melihat secara lebih mendalam bagaimana pesan diorganisir,

²⁰ Eriyanto, “*Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*”, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 76.

²¹ Ibnu Hamad, *Op. Cit.*, 21.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁵⁰

Daftar Berita yang Akan Dianalisis

| No | Hari/Tanggal | Judul Berita |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Rabu, 10 Oktober 2018 | Syamsuar Tanda Tangan Dukung Jokowi Atas Nama Gubernur Terpilih, Bawaslu Riau: Tidak Etis. |
| 2 | Kamis, 11 Oktober 2018 | Terang-Terangan Dukung Jokowi Atas Nama Gubernur dan Bupati, Seluruh Kepala Daerah Riau Terancam 2 Tahun Penjara. |
| 3 | Kamis, 11 Oktober 2018 | Syamsuar Deklarasi Dukung Jokowi, Ini Tanggapan PAN Riau. |
| 4 | Kamis, 11 Oktober 2018 | Bupati Minta Cuti Deklarasi Dukung Jokowi, Sekdaprov Riau: Kami Wajib Memberikan Hak Itu. |
| 5 | Kamis, 11 Oktober 2018 | PKS Riau: Kita Tidak Bisa Halangi Syamsuar Dukung Jokowi. |
| 6 | Jumat, 12 Oktober 2018 | Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi, Gerindra Riau: Mereka Tidak Paham Tugasnya. |
| 7 | Senin, 15 Oktober 2018 | Penuhi Panggilan, Siang Ini Perwakilan Projo Datangi Kantor Bawaslu Riau. |
| 8 | Senin, 15 Oktober 2018 | Projo Bantah Kepala Daerah Tanda Tangan Dukungan Jokowi Atas Nama Bupati dan Walikota. |
| 9 | Rabu, 17 Oktober 2018 | Dukung Jokowi, Firdaus Akan Dilaporkan Demokrat ke SBY. |
| 10 | Jumat, 19 Oktober 2018 | Sukiman: Gak Ada Dukung-Dukungan. |
| 11 | Jumat, 19 Oktober 2018 | Projo Sebut Naskah Deklarasi Dukungan Kepala Daerah Palsu, Bawaslu Riau: Silahkan Saja. |
| 12 | Senin, 22 Oktober 2018 | Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau Periksa Bupati Inhil Hari Ini. |
| 13 | Selasa, 23 Oktober 2018 | Firdaus: Sebagai Pribadi, Saya Dukung Jokowi. |
| 14 | Kamis, 25 Oktober 2018 | Siang Ini, Bupati Pelalawan Akan Penuhi Panggilan Bawaslu Riau. |
| 15 | Jumat, 26 Oktober 2018 | Usai Diperiksa Bawaslu Riau, Irwan Nasir |

Hasil dan Pembahasan

Bertuahpos.com adalah salah satu media lokal di Riau yang secara intens memberitakan kasus kepala daerah dukung capres Jokowi atas nama gubernur terpilih dan bupati/walikota. Untuk melihat bagaimana isu kepala daerah dukung Jokowi ini dibingkai oleh Bertuahpos.com, maka peneliti akan membahas satu persatu perangkat Robert N. Entman secara umum.

Tabel 5.18 Pembingkaiian Berita Keseluruhan

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Define Problem</i> | Masalah Politik, Etika dan Hukum |
| <i>Diagnose Causes</i> | Kepala daerah |
| <i>Make Moral Judgement</i> | Dukungan kepala daerah adalah dukungan yang positif. |
| <i>Treatment Recommendation</i> | Kasus ini tidak akan ditindaklanjuti. |

Sumber: Olahan Penulis

Define problems (Pendefinisian Masalah) adalah elemen pertama yang dilihat mengenai framing. Pada elemen ini kita melihat bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat oleh media, karena ketika ada suatu masalah atau peristiwa yang sama bisa dipahami secara berbeda oleh media yang berbeda. Dari 18 berita mengenai isu kepala daerah dukung Jokowi, peneliti melihat media online Bertuahpos.com tidak hanya menganggap masalah ini sebagai masalah hukum tetapi juga menganggap masalah ini sebagai masalah politik. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, dari berita yang dikeluarkan oleh Bertuahpos.com dapat dilihat kalau Bertuahpos.com tidak hanya mencoba untuk menegakan hukum kepada kepala daerah yang diduga melanggar aturan pemilu karena menyatakan dukungannya kepada salah satu capres atas nama Gubernur Riau terpilih dan bupati/walikota, tetapi disisi lain Bertuahpos.com juga melihat masalah ini sebagai masalah politik karena masalah ini terjadi pada saat kampanye panjang dan beberapa kepala daerah merupakan kader dari partai yang tidak mendukung capres Jokowi ataupun Gubernur Riau terpilih yang ketika di Pilgub 2018 diusung oleh partai yang juga bukan partai pendukung capres Jokowi. Hal ini lah yang kemudian menjadikan

masalah ini bukan hanya sekedar kepala daerah yang diduga melanggar aturan pemilu tetapi juga berkaitan dengan politik.

Kedua, sumber berita yang diwawancarai bukan hanya dari sumber berita yang berlatar belakang hukum, dalam berita ini sumber berita yang berlatar belakang hukum hanya dari Bawaslu Riau. Sedangkan sumber berita yang berlatar belakang politik dalam berita ini dari beberapa partai seperti PAN Riau, PKS Riau, Gerindra Riau, dan Demokrat Riau yang ke empat partai tersebut bukan partai pendukung capres Jokowi melainkan partai pendukung capres nomor urut dua.

Ketiga, kasus kepala daerah ini ditempatkan oleh media online Bertuahpos.com di rubrik politik hukum. Dengan menempatkan berita ini di rubrik politik hukum jadi berita ini tidak terfokus ke hukum saja melainkan ada pengaruh politiknya juga dalam kasus ini.

Diagnose Causes (Sumber Masalah) adalah elemen kedua yang dilihat mengenai framing pada perangkat Robert N. Entman. Pada elemen ini kita melihat peristiwa itu disebabkan oleh apa atau siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah. Dari 18 berita mengenai isu kepala daerah dukung Jokowi, peneliti melihat media online Bertuahpos.com menganggap kepala daerah sebagai aktor yang menyebabkan masalah ini. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, kepala daerah yang terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu capres atas nama Gubernur Riau terpilih dan bupati/walikota dalam acara deklarasi yang diadakan oleh Projo Riau. Meskipun dari kepala daerah sendiri mengklaim bahwa mereka tidak melanggar apapun dalam dukungan tersebut.

Kedua, Projo Riau juga mengklaim kalau naskah pernyataan dukungan yang beredar adalah palsu dan kepala daerah tanda tangan atas nama pribadi di spanduk dan bukan dalam naskah, tetapi disini Bawaslu Riau tetap memproses kasus ini. *Ketiga*, dapat dilihat dari bagaimana teks berita tersebut menempatkan penilaian hukum kepada kepala daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 547 dan 281, dimana pejabat negara dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dan larangan menggunakan fasilitas negara saat kampanye serta memiliki izin cuti.

Keempat, melalui pernyataan Bawaslu Riau yang mengatakan kalau

pemanggilan kepada kepala akan dilakukan. Dari pemanggilan kepala daerah dapat kita lihat kalau kepala daerah ditempatkan dalam keseluruhan berita sebagai penyebab masalah.

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) adalah elemen ketiga yang dilihat mengenai framing pada perangkat Robert N. Entman. Pada elemen ini kita melihat nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah. Elemen ini dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Dari 18 berita mengenai isu kepala daerah dukung Jokowi, media online Bertuahpos.com menekankan kalau tindakan yang dilakukan kepala daerah adalah dukungan yang positif walaupun menggunakan nama jabatan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, melalui pernyataan PKS Riau yang mengatakan kalau dukungan yang dilakukan kepala daerah ada kaitannya dengan kepentingan kepala daerah untuk dana daerah. Karena dana daerah baru bisa diambil jika kepala daerah dukung petahana. Jadi secara tidak langsung dukungan yang dilakukan kepala daerah adalah untuk kepentingan rakyat, yakni agar dana daerah bisa diambil.

Kedua, disini kepala daerah menaati aturan dengan tetap penuhi panggilan Bawaslu Riau untuk dimintai keterangan terkait dukungannya kepada capres Jokowi, walaupun mereka mengklaim tidak melanggar aturan pemilu dan ada juga sebagian kepala daerah yang mengaku tidak hadir dalam acara deklarasi tetapi tanda tangannya ada dalam naskah pernyataan dukungan kepala daerah kepada capres Jokowi atas nama jabatan tersebut. *Ketiga*, penggunaan kata eufemisme atau gaya bahasa pelembut dengan cara menggantikan kata-kata dengan kata lain yang lebih sesuai dan tidak menyinggung perasaan.¹¹⁹ Dalam hal ini, kata yang ditemukan dalam berita mengenai kasus ini seperti, tidak etis, tidak arif dan terluka.

Keempat, pernyataan Sekdaprov Riau yang mengatakan setiap kepala daerah yang mengajukan cuti maka wajib bagi Sekdaprov untuk memberikan hak cuti tersebut. Hal ini memperkuat kalau dukungan yang dilakukan kepala daerah adalah dukungan yang positif karena sudah dapat cuti dari Sekdaprov Riau.

Kelima, berkaitan dengan dukungan kepala daerah kepada capres Jokowi, Bertuahpos.com melalui pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang mengatakan

kalau tergantung bajunya. Sebagai bupati beliau dukung Jokowi sebagai presiden. Namun, sebagai pribadi dukung Jokowi sebagai calon presiden. Hal senada juga diungkapkan oleh kepala daerah yang lain. Jadi dukungan kepala daerah kepada capres Jokowi ini dianggap dukungan yang positif oleh media online Bertuahpos.com.

Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) adalah elemen keempat atau terakhir yang dilihat mengenai framing pada perangkat Robert N. Entman. Pada elemen ini kita melihat penyelesaian apa yang ditawarkan oleh media untuk mengatasi masalah. Dari 18 berita mengenai isu kepala daerah dukung Jokowi, media online Bertuahpos.com merekomendasikan atau menawarkan agar kasus ini tidak ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, ketika media melihat masalah ini sebagai masalah hukum dan kepala daerah diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bertuahpos.com merekomendasikan melalui pernyataan Bawaslu Riau untuk melakukan pemanggilan kepada kepala daerah. Adapun pemanggilan ini untuk memberikan hak klarifikasi kepada kepala daerah yang ikut mendukung dalam acara deklarasi dukung capres Jokowi dengan nama jabatan yang diadakan oleh Projo Riau. *Kedua*, ketika media melihat masalah ini sebagai masalah politik

dimana beberapa kepala daerah yang merupakan kader partai atau partai pendukung di Pilgub 2018. Bertuahpos.com merekomendasikan melalui pernyataan partai tersebut kalau akan ada pemanggilan terhadap kepala daerah dan juga akan ada tindakan dari pusat atas dukungan yang diberikan kepala daerah tersebut kepada capres Jokowi.

Ketiga, karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka Bertuahpos.com melalui pernyataan Bawaslu mengatakan kalau kasus ini tidak akan ditindaklanjuti karena tidak ada unsur pelanggaran yang terpenuhi.

Keempat, ketika dilihat dari masalah politik yang katanya kepala daerah akan dilaporkan kepusat dan menerima sanksi dari pusat. Tetapi, sampai Bawaslu Riau mengeluarkan keputusan kalau kasus ini tidak akan ditindaklanjuti, tidak nampak adanya sanksi untuk kepala daerah tersebut. Sehingga yang tampak disini kasusnya tidak ditindaklanjuti juga.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan di Bertuahpos.com mengenai isu kepala daerah dukung Jokowi dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman periode Oktober – November 2018, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Define problems* (pendefinisian masalah) yang ditekankan oleh Bertuahpos.com menunjukkan kalau Bertuahpos.com melihat isu kepala daerah bukan hanya sebagai masalah hukum tetapi disisi lain Bertuahpos.com juga melihat isu ini sebagai masalah politik dan etika karena kepala daerah dukung capres Jokowi. Hal ini diperkuat dengan meletakkan isu ini di rubrik politik hukum.
2. *Diagnose causes* (sumber masalah) yang ditekankan oleh Bertuahpos.com menunjukkan kalau Bertuahpos.com menganggap kepala daerah sebagai sumber masalah atau aktor yang menyebabkan masalah ini. Meskipun beberapa pihak tidak keberatan dengan dukungan yang dilakukan kepala daerah kepada capres Jokowi. Tetapi disini Bertuahpos.com menempatkan penilaian hukum kepada kepala daerah sehingga kepala daerah dianggap sebagai penyebab masalah.
3. *Make moral judgement* (membuat keputusan moral) yang ditekankan oleh Bertuahpos.com adalah kalau tindakan yang dilakukan kepala daerah adalah dukungan yang positif walaupun menggunakan nama jabatan. Hal ini terlihat dari pernyataan PKS Riau kalau dana daerah baru bisa diambil kalau kepala daerah dukung petahana. Selain itu, kepala daerah juga menekankan kalau secara pribadi dukung Jokowi sebagai calon presiden dan sebagai bupati dukung Jokowi sebagai presiden.
4. *Treatment recommendation* (penyelesaian masalah) yang ditekankan oleh Bertuahpos adalah merekomendasikan masalah ini agar tidak ditindaklanjuti. Sebagai konsekuensi melihat masalah ini dari hukum.

Referensi

Sumber Buku

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011.
- Barus,Sedia Willing. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta:Erlangga, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Darmawan, Ikhsan. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung:ALFABETA, 2013.

- Eriyanto. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta:LkiS, 2002.
- Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta:GRANIT, 2004.
- K, Septiawan Santa. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Bandung:Rosda, 2003.
- Mulyana, Dedi. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung:Rosda, 2015.
- Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sudianto. *Komunikasi Politik*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sumadiria, Haris. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014.
- Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tim Redaksi kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Yunus, Syarifudin. *Jurnalistik Terapan*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2010.